



**BAB 8**

# **Ke Tokyo Tanpa Widjojo**



TEMPO

"Widjojo Cs Tak Dilibatkan di CGI". Begitulah judul berita yang dimuat *Harian Rakyat Merdeka*, 13 Oktober tahun 2000. Isi beritanya, antara lain, menyebutkan bahwa inilah pertama kalinya Mafia Berkeley – julukan ekonom UI yang dikomandani Widjojo Nitisastro – tidak disertakan dalam forum Sidang CGI (Consultative Group for Indonesia). Meski tanpa disertai Widjojo, toh tim ekonomi yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mendapat komitmen bantuan alias utang luar negeri baru sebesar US\$ 4,8 miliar plus hibah US\$ 500 juta lebih.

Padahal, tadinya banyak kalangan yang meragukan delegasi Indonesia akan sukses menjaring pinjaman luar negeri untuk

---

**Widjojo Nitisastro, arsitek utama ekonomi Orde Baru bersama Presiden Soeharto dan Wapres Try Soetrisno.**

---

menambal bolong di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Maklum, yang memimpin delegasi adalah Menko Perekonomian Rizal Ramli, yang baru seumur jagung duduk di pemerintahan. Sedangkan sidang-sidang CGI sebelumnya, delegasi Indonesia selalu "dikawal" oleh Widjojo Nitisastro, yang secara berseloroh disebut sebagai "Don" Mafia Berkeley – pembahasan tentang Mafia Berkeley ini lihat: *Menggugat Mafia Berkeley*, halaman 82.

CGI adalah forum negara kreditor bagi Republik Indonesia, sebagai ganti dari IGGI (International Governmental Group on Indonesia) yang dibubarkan Soeharto tahun 1992. Baik IGGI maupun CGI setiap tahun memberikan pinjaman lunak untuk pembiayaan APBN. Pada awal Orde Baru, ketika menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Widjojo selalu memimpin delegasi Indonesia di forum internasional.

Ketika Widjojo lengser dari jabatan Menko Ekuin, digantikan oleh Ali Wardhana, dan diteruskan oleh Radius Prawiro serta Saleh Afiff, peran Widjojo tak pernah surut. Ia selalu menjadi anggota delegasi – dan memegang peranan kunci — dalam perundingan mencari utangan baru Indonesia ke mancanegara.

Soeharto boleh tumbang, tapi eksistensi Mafia Berkeley terus berlanjut hingga pemerintahan Habibie — pengganti Soeharto setelah ditumbangkan Gerakan Reformasi tahun 1998. Sebenarnya, hubungan antara Habibie dan Widjojo tidaklah akrab. Keduanya bahkan secara diam-diam menunjukkan rivalitas untuk menjadi "anak emas" Soeharto. Rivalitas antara teknolog yang diidentikkan dengan selalu ingin "tancap gas" dan ekonom yang selalu berusaha menginjak pedal "rem". Tapi, karena *networking* dan subordinasi Widjojo terhadap lembaga-lembaga keuangan dan negara-negara donor internasional sangat kuat, mau tak mau Habibie pun terpaksa meminta jasa Widjojo dalam perundingan dengan CGI.

Tapi, pada masa pemerintahan duet Abdurrahman Wahid-Megawati, yang mengangkat Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian, peran Widjojo langsung tergusur. Menko Perekonomian Rizal Ramli mengambil oper tongkat komando delegasi Indonesia ke Sidang CGI di Tokyo, 17 – 18 Oktober 200, tanpa melibatkan Widjojo sama sekali.

Tak mudah bagi Rizal Ramli untuk memimpin delegasi ke sidang CGI itu. Maklum, atas masukan dari anggota-anggota Mafia Berkeley, Gus Dur semula ngotot agar Widjojo ikut dilibatkan dalam perundingan CGI. Alasannya, Widjojo sudah sangat berpengalaman melakukan perundingan seperti itu. Apalagi banyak yang "menakut-nakuti" Gus Dur, bahwa tanpa menyertakan Widjojo dalam delegasi Indonesia, forum CGI bakal gagal memperoleh komitmen utang luar negeri baru.

"Rizal, coba kamu ikutkan Widjojo dalam delegasi ke sidang CGI," kata Gus Dur kepada Rizal Ramli, sebelum berangkat ke Tokyo. "Kenapa dia harus jadi anggota delegasi, Gus?" tanya Rizal Ramli. "Ya, siapa tahu bisa membantu," jawab Gus Dur.

Rizal Ramli terdiam. Dia bisa menangkap gelagat, pasti ada beberapa klik Mafia Berkeley yang memberikan bisikan kepada Gus Dur. Pasti ada pihak-pihak yang memberikan gambaran bahwa hanya Wijodjo yang bisa memuluskan perundingan.

Memang, keterlibatan Widjojo dan Mafia Berkeley yang puluhan tahun itu telah menimbulkan mitos, bahwa hanya merekalah yang memiliki hubungan baik dengan dunia internasional. Lobi mereka kuat di negara-negara kreditor. Hanya melalui mereka sajalah, Indonesia bisa memperoleh pinjaman dari negara kreditor. Tanpa mereka, khususnya Widjojo, dipastikan Indonesia akan gagal mencari sumber dana APBN dari mancanegara.

Selaku Menko Perekonomian, Rizal Ramli merasa PD (percaya diri) akan kemampuan dan kapabilitas diri dan timnya untuk berunding dengan negara dan lembaga kreditor internasional. Dia bertekad untuk meruntuhkan mitos, hanya Mafia Berkeley yang bisa menjalin kerjasama internasional.

"Gus Dur, sebenarnya percaya kepada saya atau Pak Widjojo. Mau diserahkan kepada siapa cap Garuda Indonesia ini? Kalau mau diserahkan kepada orang lain, silakan. Tapi saya mundur dari jabatan Menko Perekonomian," kata Rizal Ramli dengan nada datar.

Gus Dur kaget mendengar pernyataan Rizal Ramli yang sangat tegas itu. "Ya, saya percaya kamu dong," ujarnya.

"Tapi, saya tidak akan mengikutsertakan Pak Widjojo dalam delegasi

ke Tokyo," kata Rizal, lebih menekankan sikapnya.  
"Saya percaya kepada kamu. Tapi hati-hati *aja ya*," kata Gus Dur.

### Naik *Subway*, Bukan Mobil Mewah

"Cap" Garuda Indonesia alias "komandan" delegasi Indonesia ke Sidang CGI akhirnya jatuh ke tangan Rizal Ramli. Karena itu, dia sangat leluasa mengatur anggota rombongannya. Rizal Ramli enggan mengikuti jejak langkah yang ditinggalkan para pendahulunya dalam memimpin delegasi Indonesia.

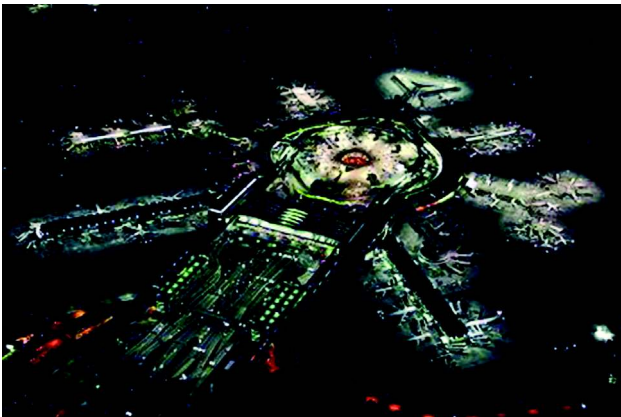
Ketika itu pula, Rizal memperlihatkan sifat *humble* sejak mendarat di Bandara Narita. Selama puluhan tahun, delegasi Indonesia yang datang ke forum perundingan IGGI maupun CGI selalu dijemput dengan rangkaian mobil supermewah. Dari bandara mereka diantar ke hotel bintang lima tempat menginap.

Kali ini Rizal Ramli menolak untuk menikmati kursi empuk sedan mewah. Secara mengejutkan, Rizal Ramli dan seorang anggota delegasi menggunakan *subway* dari bandara ke Hotel New Otami, Tokyo, tempat menginap delegasi Indonesia. Sikap itu diambil sebagai bentuk rasa prihatin terhadap kondisi ekonomi yang masih babak belur dihajar krisis ekonomi. "Kita ini kan negara miskin, *ngapain* sok jagoan bermewah-mewah," kata Rizal, kepada anggota delegasinya,

---

## Bandara Narita

---



Istimewa

ketika menjelaskan mengenai moda angkutan yang dipilihnya.

Delegasi dari negara kreditor dan lembaga keuangan internasional merasa terkesan pada sikap dan tindakan Rizal Ramli seperti itu. Mereka melihatnya sebagai bukti kesungguhan Indonesia untuk berbenah dari keterpurukan. Hasilnya, delegasi Indonesia bukan saja berhasil menepis keraguan dan ramalan akan gagal banyak kalangan di dalam dan luar negeri. Bahkan mereka pulang dengan membawa hasil jauh di atas ekspektasi.

Salah satu catatan penting yang dilakukan Rizal Ramli dalam memimpin delegasi Indonesia ke forum CGI adalah dengan merangkul aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Binny Boechori dari INFID. Selama ini, INFID dikenal sangat kritis terhadap kebijakan utang luar negeri Indonesia. "Jadi, sidang CGI yang saya ikuti waktu itu merupakan sidang yang paling terbuka," kata Rizal mengenang kembali.

Maka, patahlah mitos hanya Mafia Berkeley yang mampu menjalin kerjasama yang baik dengan para kreditor luar negeri. Patah pula keraguan banyak kalangan di dalam negeri yang jauh-jauh hari sudah meragukan keberhasilan delegasi yang dipimpin Rizal Ramli. Bahkan, seorang ekonom UI, dengan gamblang menyatakan di *headline* sebuah harian terkemuka: "Rizal Ramli bakal gagal dalam perundingan CGI karena miskin pengalaman dan tidak melibatkan Widjojo".

Buktinya, Rizal Ramli bukan hanya berhasil mengaet pinjaman sebesar US\$ 4,8 miliar, tapi juga mendapatkan US\$ 530 juta berupa hibah (*grant*) dan *technical assistance*. Sebuah rekor angka hibah terbesar karena sebelumnya, delegasi Indonesia paling banter cuma dapat hibah US\$ 200 juta.

### **Menggugat Mafia Berkeley**

Istilah Mafia Berkeley ditujukan pada sejumlah menteri ekonomi yang menjadi penentu strategi pembangunan Indonesia pada awal Orde Baru. Sebelum menduduki berbagai posisi strategis di pemerintahan, mereka menimba ilmu ekonomi di Universitas California, Berkeley, pada tahun 1960-an.

Tokoh sentral Mafia Berkeley adalah Widjojo Nitisastro, yang menjadi Ketua Bappenas sejak Kabinet Pembangunan I pada tahun 1969. Kolega Widjojo, antara lain, Ali Wardhana, Emil Salim, Sumarlin (alumnus Pittsburgh University, tapi mengikuti garis kebijakan Mafia Berkeley), dan Saleh Afiff. Radius Prawiro yang berpendidikan akuntan dari Belanda, juga masuk kelompok generasi pertama Mafia Berkeley.

Sebagai konseptor dan arsitek utama pembangunan ekonomi Indonesia 1966 – 1997, Widjojo leluasa menempatkan kolega dan kadernya untuk menduduki posisi penting di berbagai kementerian. Emil Salim, Sumarlin, Saleh Afiff, diorbitkan ke posisi menteri setelah “magang” di Bappenas. Demikian pula generasi ekonom yang lebih muda, mendaki ke posisi empuk di pemerintahan setelah berkarier di Bappenas. Mereka, antara lain, Adrianus Mooy, BS Moelyana, Sudradjad Djiwandono, dan Boediono.

Kebijakan makro ekonomi yang diusung Mafia Berkeley adalah pengendalian laju inflasi lewat kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, liberalisasi sektor keuangan – dikenal dengan istilah deregulasi dan debirokratisasi pada tahun 1980-an, liberalisasi sektor industri dan perdagangan, dan privatisasi alias penjualan aset milik negara.

Kehadiran B.J. Habibie, yang dengan cepat merebut simpati Soeharto, membuat kubu Widjojo dan kawan-kawan menemukan rival yang sepadan dalam sirkulasi elit birokrasi. Habibie, lewat markasnya di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga berhasil menempatkan orang-orangnya di kabinet, seperti Wardiman Djojonegoro dan Rahardi Ramelan.

Meski Habibie menjadi rival kuat dalam “memperebutkan” kursi kabinet, toh dalam cetak biru pembangunan ekonomi, posisi Mafia Berkeley tak tergoyahkan. Generasi kedua dan ketiga Mafia Berkeley bertebaran di Bappenas, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia.

“Banyak anggota dan murid Mafia Berkeley yang menduduki posisi kunci di bidang ekonomi menjadi saluran strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia, dan USAID,” kata Rizal Ramli, dalam seminar “50 Tahun Mafia Berkeley vs Gagasan

Alternatif Pembangunan Ekonomi Indonesia”, di Jakarta, tahun lalu.

Bagi Rizal Ramli, Mafia Berkeley, meski ditopang rezim otoriter selama lebih dari tiga dekade, gagal menjadikan Indonesia sebagai negara besar di Asia. Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, China nyaris sama, yaitu kurang dari US\$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP perkapita negara-negara tersebut pada tahun 2004, mencapai: Indonesia sekitar US\$ 1.000, Malaysia US\$ 4.520, Korea Selatan US\$ 14.000, Thailand US\$ 2.490, Taiwan US\$ 14.590, China US\$ 1.500. Ternyata bahwa kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley nyaris 40 tahun tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mewariskan potensi sebagai salah satu negara gagal (*failed state*) di Asia.

Mafia Berkeley telah gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun didukung rezim otoriter selama 32 tahun. Selain ketinggalan dari segi pendapatan per kapita, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, serta memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh. Padahal negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Cina dan Thailand tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti Indonesia. Di bawah pengaruh dan kekuasaan Mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya kekayaan alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US\$ 1.000. dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimal serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri.

Mafia Berkeley juga gagal melakukan reformasi terhadap birokrasi dan justru mendorong pegawai negeri dan TNI untuk bertindak koruptif karena penentuan skala gaji yang sangat tidak manusiawi. Anggota dan murid Mafia Berkeley sendiri direkayasa untuk mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi melalui penunjukan mereka sebagai komisaris di BUMN-BUMN, *double/triple billing* di BI, DepKeu dan Bappenas. Dengan pendapatan yang tinggi tersebut, Mafia Berkeley tidak memiliki empati terhadap nasib pegawai negeri dan TNI sehingga tidak berupaya melakukan reformasi penggajian pegawai negeri dan TNI. Dengan sengaja maupun tidak sengaja, mereka mendorong pegawai negeri dan TNI menjadi koruptor.

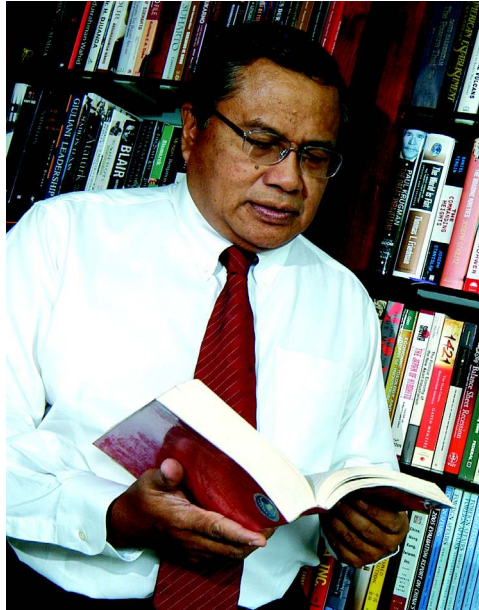


Kegagalan penting lainnya yang dilakukan oleh Mafia Berkeley adalah mengundang keterlibatan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi pada bulan Oktober 1997. Keterlibatan IMF tersebut membuat krisis menjadi lebih parah. Tanpa keterlibatan IMF, krisis ekonomi akan tetap terjadi, tetapi skalanya akan relatif lebih kecil (pertumbuhan ekonomi antara - 2% sampai 0%) pada tahun 1998, tetapi keterlibatan IMF telah mengakibatkan ekonomi Indonesia anjlok luar biasa -12,8% pada tahun 1998.

Biaya sosial ekonomis dari krisis tersebut dalam bentuk kerusuhan sosial (*IMF-provoked riots*), peningkatan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitalisasi bank lebih dari Rp 600 triliun, serta tambahan beban utang puluhan miliar dollar masih terasa sampai saat ini. Dokter yang diminta tolong untuk menyembuhkan penyakit pasien, selain gagal menyembuhkan penyakit juga melakukan berbagai amputasi yang tidak perlu dan ternyata membebankan biaya kegagalannya kepada sang pasien.

Dalam menjawab berbagai kegagalan tersebut, anggota Mafia Berkeley biasanya menggunakan alasan klasik yang menyesatkan, yaitu akibat perilaku mantan Presiden Soeharto. Memang, Soeharto penuh KKN, tapi berbagai kegagalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Soeharto. Mafia Berkeley ikut bertanggung jawab karena merekalah yang merumuskan strategi, kebijakan dan terlibat dalam implementasinya. Banyak dari berbagai kegagalan tersebut berada pada tataran sangat teknis dan operasional yang tidak dipahami oleh Soeharto. Adalah sangat tidak bertanggungjawab dan tidak ksatria, bersedia mejadi pejabat selama 32 tahun, ikut menikmati privileges dan ekses kekuasaan Soeharto, tetapi kemudian menimpakan semua kegagalan dan kesalahan kepada Soeharto, itupun baru berani setelah Soeharto tidak berkuasa.

Mengapa Mafia Berkeley gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun berkuasa selama nyaris 40 tahun? "Karena strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Mafia Bekeley akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi (sekedar kepanjangan tangan) dari kepentingan global," kata Rizal Ramli. Padahal, lanjutnya lagi, tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti model Konsensus Washington.



Koleksi Pribadi

---

**Ketika memimpin delegasi Indonesia ke pertemuan CGI di Tokyo tahun 2001, Rizal Ramli enggan membawa Widjojo Nitisastro senbagai anggota delegasi.**

---

Kemerosotan selama tiga dekade di Amerika Latin (1970-2000) adalah contoh monumental dari kegagalan tersebut. Justru negara-negara yang melakukan penyimpangan dari model Washington Konsensus seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan Cina berhasil meningkatkan kesejahteraan dan memperbesar kekuatan ekonominya. Negara-negara yang berhasil tersebut mengikuti model pembangunan Asia Timur yang memberikan peranan yang seimbang antara negara dan swasta, serta ketergantungan utang yang minimal. “Dua negara Asia, Indonesia dan Filipina yang patuh pada Washington Konsensus, mengalami kemerosotan ekonomi terus-menerus, ketergantungan utang yang permanen, dan ketimpangan pendapatan sangat mencolok,” kata Rizal Ramli.